

Pendidikan di Sulawesi Selatan pada Awal Masa Kemerdekaan: Dinamika dan Tantangan (1945-1950)

Muh. Akbar^{1✉}, Bahri², Rufer Firma Harianja¹, Amri³

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Jl. Raya Kampus Unima di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, 95618, Indonesia

²Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Jl. A.P Pettarani No.1, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia

³Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9. Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia

✉Corresponding Author: muhakbar@unima.ac.id

Article Info	ABSTRACT
Timeline Accepted : 25/05/2026 Revised : 15/07/2026 Online : 28/07/2026 Published : 31/07/2026	<i>Education in South Sulawesi during the early independence period was still precarious state. The Indonesian nation faced numerous challenges during this time, experiencing significant transformations not only within the government sector but also in the field of education. National education aimed to cultivate social, democratic, and responsible citizens who were prepared to contribute their energy and thoughts to the state. This study aims to examine the education system, the condition of educators, the curriculum and teaching methods, as well as the educational levels in South Sulawesi during the early independence period. The research method utilized in this study is the historical research method. The results of this study indicate that despite the limitations of the early independence era, an inclusive educational foundation was successfully established due to the collective commitment between the state and the community. The challenges faced by educators including postcolonial competency issues, curriculum adaptation, and economic constraints were effectively addressed through the synergy between government policies and community self-reliance. The curriculum and teaching methods shifted toward a nationalist-participatory approach grounded in local wisdom, the implementation of which heavily relied on community support to the scarcity of teaching materials. Moreover, educational consolidation successfully overcame geographical and infrastructural barriers through the synergistic efforts of formal schools, religious institutions, and community-based illiteracy eradication movements. This implies the necessity of strengthening the historical foundation of current educational policies to enrich perspectives on how education</i>
Keyword: Educational Dynamics, Sulawesi Selatan, Independence	

in South Sulawesi has evolved from the Colonial era toward the formation of a stronger national identity.

Kata Kunci:
Dinamika Pendidikan,
Sulawesi Selatan,
Kemerdekaan

ABSTRAK

Pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan masih dalam keadaan yang sulit. Bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan banyak mengalami kesulitan dimana banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan, keadaan tenaga pendidik di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan, dan kurikulum dan metode pengajaran di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan, serta jenjang pendidikan. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan di masa awal kemerdekaan tetap mampu melahirkan fondasi pendidikan yang inklusif berkat komitmen kolektif antara negara dan masyarakat, tenaga pendidik di Sulawesi Selatan awal kemerdekaan yang terhambat kompetensi pascakolonial, adaptasi kurikulum, dan keterbatasan ekonomi berhasil diakomodasi melalui sinergi kebijakan pemerintah dan swadaya masyarakat, kurikulum dan pengajaran di Sulawesi Selatan pada awal kemerdekaan beralih ke pendekatan nasionalis partisipatif berbasis kearifan lokal, yang implementasinya ditopang oleh swadaya masyarakat akibat keterbatasan materi ajar, serta konsolidasi pendidikan di Sulawesi Selatan pada awal kemerdekaan berhasil mengatasi kendala geografis dan infrastruktur melalui sinergi sekolah formal, lembaga keagamaan, serta gerakan pemberantasan buta huruf berbasis komunitas. Hal ini mengimplikasikan perlunya penguatan basis sejarah dalam kebijakan Pendidikan saat ini, agar dapat memperkaya perspektif tentang bagaimana Pendidikan di Sulawesi Selatan telah berevolusi dari masa Kolonial menuju pembentukan identitas nasional yang lebih kuat.



Jurnal Pendidikan Sejarah
work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dan esensial dalam proses dekolonialisasi dan identitas Nasional, terutama untuk negara-negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Secara teoritis, pendidikan memegang fungsi ganda dimana pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi sosial yang melanggengkan kekuasaan yang dominan. Akan tetapi disisi lain, Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk pembebasan yang membangkitkan kesadaran kritis masyarakat (Bourdieu, P., & Passeron, 1990). Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan hanya sebagai momentum pergantian kekuasaan politik akan tetapi menjadi titik tolak revolusi sosial dan budaya dimana pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri (Haryanah, 2004). Hal tersebut didukung oleh (Tilaar, 2012) masa transisi dari sistem pendidikan kolonial yang deskriminatif menuju sistem pendidikan yang egaliter dan terbuka. Hal tersebut menjadi salah tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Pendiri Bangsa. Sistem kolonial yang sebelumnya telah menciptakan pemisahan yang besar melalui pendidikan, dimana pendidikan yang berkualitas hanya dapat diakses oleh kaum bangsawan dan birokrat kolonial sementara disisi lain, rakyat jelata hanya diberikan akses pendidikan yang terbatas dan deskriminatif bahkan dibiarkan buta huruf (Latif, 2014).

Pada masa awal kemerdekaan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berada dalam fase yang sangat memprihatinkan yang mengakibatkan terjadinya instabilitas politik dan konflik bersenjata yang

masih berlangsung. Pada periode ini sering disebut sebagai revolusi fisik, dimana bangsa Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari upaya restorasi kolonial oleh NICA yang menggandeng tentara sekutu (Ricklefs, 2008). Kondisi yang terjadi memberikan dampak yang signifikan, gedung-gedung sekolah hancur akibat adanya peperangan tenaga pengajar yang sangat minim dan sebagian besar turut mengangkat senjata ke medan gerilya serta kurikulum yang digunakan masih bersifat darurat dan belum adanya sistem pendidikan yang baku (Vickers, 2013). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan akan tetapi hal tersebut telah bermetamorfosis menjadi instrumen perjuangan ideologis untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda (Hasan, 2019).

Dinamika pendidikan pada masa ini menjadi kompleks ketika ditarik ke dalam konteks lokalistik, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan di Sulawesi Selatan memiliki lanskap sosial politik yang unik dan penuh dengan gejolak pada awal masa kemerdekaan. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya. Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominasi praktek Pendidikan (Saputra, 2008). Di sisi lain, Belanda berhasil membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), pada akhir tahun 1946 sebagai bagian dari Balkanisasi untuk memecah belah wilayah Indonesia dengan menggunakan politik adu domba (Poelinggomang, 2016).

Konstalisasi politik ini mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan di Sulawesi Selatan antara kelompok yang Pro Republik dan Pro Federalis yang bekerjasama dengan struktur pemerintahan bentukan Belanda (Asba, 2007).

Kondisi sosial politik yang sarat akan konflik ini membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi jalannya Pendidikan di Sulawesi Selatan. (Syukur, 2021) mencatat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan pada periode 1946-1947 mengalami trauma mendalam bagi kampanye pasifikasi brutal yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Pembantaian massal menelan banyak korban jiwa, dimana tidak hanya melumpuhkan roda ekonomi dan pemerintahan desa tetapi juga mematikan aktivitas pendidikan secara total diberbagai wilayah seperti Makassar, Gowa, Takalar dan Pare-Pare. Banyak guru yang dicurigai sebagai simpatisan politik republik yang ditangkap, disiksa dan dibunuh sementara itu gedung-gedung sekolah yang dibangun pada masa pendudukan Jepang dialih fungsikan menjadi karkas militer bahkan ada yang dibakar habis (Said, 2015). Pada bagian wilayah yang dikuasi oleh NICA dan pemerintahan NIT, sekolah sekolah mulai dibangun dan dibuka kembali akan tetapi dibuka dengan tujuan untuk mencetak tebaga terampil yang loyal terhadap pemerintahan federal bukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme (Darmawan, 2018).

Permasalahan kompleks pendidikan di Sulawesi Selatan pada awal masa kemerdekaan mempertontonkan fenomena ssosiologis yang sangat menarik untuk dikaji, dimana sekolah diubah menjadi kontestasi ideologi. Disatu sisi, Pemerintah NIT berusaha menguasai dan menghegemoni kurikulum dan nilai-nilai yang menguntungkan posisi Belanda, sementara

disisi lain tokoh-tokoh pendidikan lokal yang pro kepada republik secara diam-diam melakukan gerilya di daerah pedalaman untuk mengobarkan semangat anti-kolonialisme (Rahman, 2020). Sangat disayangkan dalam penulisan sejarah lokal di Sulawesi Selatan selama ini hanya didominasi oleh narasi Politik dan Militer (T. Abdullah, 2010). Berbagai literatur yang ada hanya menyoroti heroisme perlawanan laskar pemuda, pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar, dan manuver politik yang dilakukan oleh bangsawan Bugis-Makassar dalam menyikapi pembentukan NIT. Hal tersebut berakibat pada sejarah sosial yang berkaitan dengan sejarah pendidikan nasib para insan pendidik seringkali terlupakan dan menjadi celah kosong dalam historiografi Indonesia.

Tinjauan terhadap berbagai literatur mutakhir menunjukkan bahwa historiografi Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan masih didominasi oleh narasi politik, militer, dan pergolakan elite. Kajian-kajian terdahulu, seperti studi mengenai dampak sosial-politik kampanye militer Westerling oleh Syukur (2021) serta dinamika persaingan elite pada masa revolusi oleh Najamuddin (2015), lebih terfokus pada pergolakan fisik bersenjata. Dalam narasi tersebut, isu pendidikan umumnya hanya ditempatkan sebagai variabel pelengkap atau sebatas latar belakang dari kemunculan kelompok terdidik.

Di sisi lain, studi yang secara khusus membahas sejarah pendidikan di kawasan ini memang telah dilakukan, namun masih berpusat pada pendekatan makro dan struktural. Menelusuri jejak pendidikan di Sulawesi Selatan: dari sistem pendidikan tradisional hingga sistem pendidikan modern oleh St. Junaeda (2014), pendidikan di masa revolusi: menelusuri jejak-jejak sekolah darurat di Indonesia Timur oleh Darmawan (2018),

hingga analisis kontestasi ideologi dalam ruang kelas: pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa Negara Indonesia Timur oleh Rahman (2020), cenderung melihat pendidikan dari kacamata kebijakan yang sentralistik. Akibatnya, belum ada penelitian yang secara konkret membedah anatomi pendidikan di tingkat akar rumput di Sulawesi Selatan pada masa krisis kemerdekaan.

Terdapat kekosongan literatur dalam menganalisis secara mendalam bagaimana masyarakat, guru, dan peserta didik bertahan hidup serta beradaptasi demi mempertahankan proses pembelajaran di tengah teror militer dan dualisme pemerintahan. Oleh karena itu, memahami sejarah pendidikan di Sulawesi Selatan pada fase krisis ini menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya untuk melengkapi historiografi pendidikan nasional yang masih rumpang, melainkan juga untuk memberikan pemahaman mengenai akar historis ketimpangan sistem pendidikan di Kawasan Indonesia Timur. Melalui rekonstruksi sejarah yang lebih sistematis, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membedah transformasi kurikulum darurat, strategi penyediaan guru, hingga peran sentral tokoh-tokoh lokal dalam menjaga nyala api pendidikan di tengah bayang-bayang konflik.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini disusun untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji secara historis dan sosiologis kondisi pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sejarah pendidikan lokal yang

memberikan kontribusi pada diskursus sejarah pendidikan nasional indonesia secara keseluruhan.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode sejarah (metode historis). Proses tahapan kerjanya meliputi: Pertama, Heuristik dan kritik sumber (intern dan ekstern) yang dimana hal ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk kajian pendidikan di Sulawesi Selatan awal kemerdekaan. Lalu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan ataupun lisan dilakukan proses kritik untuk melihat apakah data yang diperoleh cocok dan dipercaya serta otensitas yang terdapat pada materi itu jelas dan berkualitas. Kedua, interpretasi merupakan penafsiran sumber agar memperoleh fakta sejarah yang diambil sehingga dipercaya kebenaran sumbernya. Terakhir historiografi, merupakan sistem penulisan serta penyusunan sistematis pada sistem pendidikan di awal kemerdekaan (Sukmana, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan di Sulawesi Selatan pada Masa Awal Kemerdekaan

Sistem pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di wilayah ini, terutama mengingat kondisi geografis dan topografis yang unik dari daerah tersebut. Sebagai bagian dari negara kepulauan dengan geografi yang bervariasi, Sulawesi Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam membangun dan memelihara fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau. Pada masa itu,

terdapat keterbatasan infrastruktur dasar seperti gedung-gedung sekolah yang sering kali sederhana dan kurang memadai, terutama di daerah pedalaman dan kawasan terpencil. Bangunan-bangunan sekolah ini sering kali terdiri dari struktur yang tidak tahan lama dan kurang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang bisa diberikan. Keterbatasan ini menambah beban bagi sistem pendidikan yang sudah menghadapi berbagai kendala lainnya, seperti kekurangan fasilitas dan alat bantu pendidikan (Wahib, 2022).

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menyadari urgensi untuk mengatasi masalah ini dan mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur pendidikan di Sulawesi Selatan. Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi pembangunan sekolah-sekolah baru dan renovasi sekolah-sekolah yang ada, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah urban dan pedesaan. Namun, kendala geografis seperti topografi yang berbukit-bukit dan aksesibilitas yang sulit sering kali menjadi penghalang utama dalam upaya untuk meratakan pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah. Daerah-daerah terpencil, khususnya, sering kali tertinggal dalam upaya ini, memperburuk ketimpangan dalam akses pendidikan dan menambah tantangan bagi siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah terdekat. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa semua wilayah, tidak peduli seberapa terpencilnya, mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai (Fauzi, 2024).

Sistem pendidikan pada masa awal kemerdekaan tidak hanya terbatas pada pembangunan gedung-gedung sekolah, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Sayangnya, pada saat itu, sulit untuk memenuhi semua kebutuhan ini di setiap sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sering mengalami kendala dalam mendapatkan buku-buku dan peralatan pendidikan lainnya. Keterbatasan sumber daya ini mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di Sulawesi Selatan pada periode tersebut, karena banyak sekolah yang hanya memiliki fasilitas dasar yang sangat terbatas. Misalnya, banyak sekolah yang tidak memiliki laboratorium sains yang memadai atau perpustakaan yang lengkap, yang tentunya membatasi pengalaman belajar siswa dan menghambat pengembangan keterampilan praktis yang penting untuk pendidikan mereka (St. Junaeda, 2014).

Upaya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Sulawesi Selatan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Program-program pembangunan sekolah sering kali melibatkan kerja sama dengan komunitas lokal untuk mendirikan atau memperbaiki sekolah dengan dana dan tenaga sukarela, sebagai bentuk swadaya untuk mendukung pendidikan di wilayah mereka. Masyarakat setempat seringkali berkontribusi dalam bentuk sumbangan material, tenaga kerja, dan dukungan logistik untuk proyek-proyek pendidikan, yang mencerminkan komitmen dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan. Meskipun demikian, tantangan ekonomi dan logistik sering kali membuat upaya ini tidak konsisten di seluruh wilayah, dengan beberapa daerah yang lebih mampu mendapatkan dukungan yang memadai sementara yang lain

tetap mengalami kekurangan sumber daya dan fasilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya keras dari berbagai pihak, pencapaian yang merata dalam pembangunan infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan besar (Efendi & Sholeh, 2023).

Kualitas bangunan sekolah juga menjadi perhatian penting, mengingat Sulawesi Selatan terletak di wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan cuaca ekstrem. Dengan risiko bencana alam yang tinggi, penting untuk merencanakan dan membangun gedung-gedung sekolah yang tahan gempa dan aman bagi siswa dan pendidik selama proses belajar mengajar. Namun, implementasi standar keamanan ini sering kali terbatas oleh keterbatasan teknologi dan keahlian konstruksi di masa lalu, yang mengakibatkan beberapa sekolah tidak mampu memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, sekolah-sekolah yang dibangun tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kondisi bencana, yang meningkatkan risiko keselamatan bagi para siswa dan staf (Efendi & Sholeh, 2023).

Selain infrastruktur fisik, keberadaan sarana pendukung seperti transportasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memastikan akses pendidikan yang merata di Sulawesi Selatan. Ketersediaan transportasi yang baik dapat membantu mengatasi kendala geografis dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan formal di berbagai daerah. Namun, jaringan transportasi yang terbatas di beberapa daerah terpencil masih menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan ini. Banyak siswa di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh dengan transportasi yang tidak memadai untuk mencapai sekolah, yang

sering kali berdampak pada tingkat kehadiran dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pendidikan (Fauzi, 2024).

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Keberhasilan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan sering kali bergantung pada kebijakan, perencanaan, dan alokasi anggaran yang efektif dari pemerintah daerah yang memahami kondisi dan kebutuhan setempat. Tantangan-tantangan ini sering kali memerlukan solusi lokal yang inovatif dan fleksibel untuk memastikan bahwa setiap anak di Sulawesi Selatan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemerintah daerah harus mampu mengadaptasi strategi pembangunan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kondisi lokal, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor geografis, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di wilayah mereka (Efendi & Sholeh, 2023).

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Meskipun berbagai kendala menghadang, seperti keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, dan kebutuhan akan perencanaan yang baik, langkah-langkah ini merupakan fondasi penting menuju penciptaan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di wilayah ini. Upaya-upaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di masa lalu tetapi juga memberikan dasar bagi perkembangan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan, yang berdampak positif dalam

upaya untuk membangun masyarakat yang lebih berpendidikan dan berdaya saing di Sulawesi Selatan.

Keadaan Tenaga Pendidik di Sulawesi Selatan pada Masa Awal Kemerdekaan

Tenaga pendidik di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia memainkan peran yang sangat sentral dalam upaya memajukan sistem pendidikan di wilayah tersebut. Pada periode ini, tenaga pendidik menghadapi tantangan yang sangat besar dalam hal perekrutan, pengembangan, dan pemeliharaan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan terampil untuk mendidik generasi muda di Sulawesi Selatan. Keadaan ini mencerminkan ketidakseimbangan yang signifikan antara kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dan kapasitas tenaga pendidik yang ada. Meskipun terdapat tekad dan komitmen kuat untuk memperbaiki kualitas pendidikan, banyak guru-guru pada masa itu masih berada dalam kondisi yang jauh dari ideal, dengan banyak di antara mereka yang belum menerima pendidikan formal atau pelatihan profesional yang memadai. Ini terutama disebabkan oleh dominasi sistem pendidikan kolonial Belanda yang memprioritaskan pembentukan birokrat daripada pengembangan kapasitas pendidik lokal, yang menyebabkan adanya kesenjangan besar dalam kualitas tenaga pendidik yang tersedia (Basri, H., Afriza, Nurhayuni, 2024).

Pada masa awal kemerdekaan, Sulawesi Selatan menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang terlatih dan berkualitas, yang memengaruhi kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan pendidikan yang efektif dan memadai kepada siswa-siswanya. Sebagian besar guru-guru yang ada pada saat itu adalah mereka yang dididik

dengan sistem kolonial, yang sering kali kurang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional pasca-kemerdekaan. Guru-guru tersebut, yang sering kali minim pendidikan formal dan pelatihan profesional, harus beradaptasi dengan kurikulum baru dan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme Indonesia. Upaya untuk mengatasi kekurangan ini memerlukan investasi besar dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional. Program-program pelatihan ini dirancang untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan guru, memastikan bahwa mereka dapat mengajar dengan cara yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan pada masa itu (Nurfatimah et al., 2022).

Namun, implementasi dari program-program pelatihan dan pengembangan ini sering kali terhambat oleh berbagai keterbatasan, terutama di daerah-daerah terpencil di Sulawesi Selatan. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di daerah-daerah ini membuat pelaksanaan program pelatihan menjadi lebih sulit, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas dan jangkauan dari upaya-upaya tersebut. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung peningkatan kapasitas tenaga pendidik, keterbatasan tersebut sering kali menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan yang diterima di berbagai daerah. Dalam menghadapi tantangan ini, strategi lain yang diterapkan termasuk pemberian insentif dan penghargaan bagi guru-guru yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam mendidik generasi muda. Program insentif ini bertujuan untuk memotivasi guru dan meningkatkan

kualitas pengajaran, meskipun dampaknya bervariasi tergantung pada implementasinya di berbagai wilayah (Nurfatimah et al., 2022).

Selain itu, kondisi sosial-ekonomi yang beragam di Sulawesi Selatan juga mempengaruhi keberlangsungan karir tenaga pendidik. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena gaji yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki biaya hidup yang tinggi. Kesulitan ekonomi ini sering kali menyebabkan guru-guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan atau mengalami stres yang mempengaruhi kinerja mereka sebagai pendidik. Dalam konteks ini, peran komunitas lokal menjadi sangat penting dalam mendukung dan memelihara kualitas tenaga pendidik. Program swadaya dari masyarakat, seperti inisiatif sukarela untuk mendukung pendidikan atau membangun infrastruktur pendidikan, sering kali menjadi tambahan yang sangat berharga dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah ini (Suradi, 2018).

Pada masa awal kemerdekaan, perubahan dalam kebijakan pendidikan juga mempengaruhi keadaan tenaga pendidik. Penghapusan sistem pendidikan kolonial Belanda dan penggantian dengan kurikulum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan identitas bangsa yang lebih kuat di Sulawesi Selatan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga memerlukan adaptasi dari tenaga pendidik yang harus mempelajari dan mengimplementasikan pendekatan baru dalam pendidikan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi bagian dari visi

untuk membangun masyarakat yang lebih terdidik dan mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan guru diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam taraf hidup masyarakat dan kemajuan sosial-ekonomi di wilayah ini (Suradi, 2018).

Secara keseluruhan, keadaan tenaga pendidik di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan mencerminkan upaya yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan tenaga pendidik terlatih, keterbatasan akses pendidikan tinggi, kesulitan ekonomi, dan dampak perubahan kebijakan pendidikan, langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan untuk mengubah pendidikan menjadi motor penggerak perubahan positif di Sulawesi Selatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berpendidikan dan berdaya saing.

Kurikulum dan Metode Pengajaran di Sulawesi Selatan pada Masa Awal Kemerdekaan

Kurikulum dan metode pengajaran di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia mengalami transformasi yang mendalam, mencerminkan upaya besar dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang baru saja diperoleh. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda yang sebelumnya mendominasi, dan menggantinya dengan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan

serta konteks lokal, termasuk di Sulawesi Selatan. Sistem pendidikan yang diwariskan oleh kolonial Belanda umumnya berfokus pada pembentukan birokrat dan pegawai negeri, yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan kurang memperhatikan konteks sosial budaya setempat. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan kekayaan budaya serta kearifan lokal di wilayah yang sangat beragam seperti Sulawesi Selatan (Chairunnisa et al., 2024).

Pengenalan kurikulum nasional Indonesia menjadi tonggak penting dalam upaya ini. Kurikulum baru ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran nasional dalam diri siswa, sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap identitas Indonesia. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membangun kesadaran nasional yang kuat di kalangan generasi muda, yang penting untuk menjaga persatuan dan integritas bangsa di tengah keragaman budaya dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Kurikulum ini mencakup materi pelajaran yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang relevan dengan kondisi lokal, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri sambil merasa terhubung dengan identitas nasional yang lebih luas. Pembaharuan kurikulum ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai unsur pendidikan formal dengan pendidikan karakter yang memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam berkontribusi pada masyarakat (Insani, 2019).

Dalam konteks ini, penyusunan kurikulum lokal yang memperhatikan kekayaan budaya dan sumber daya alam Sulawesi Selatan

menjadi sangat penting. Kurikulum ini diharapkan dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional ke dalam proses pembelajaran. Misalnya, pelajaran tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, serta penggunaan sumber daya lokal dalam pembelajaran, merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam kurikulum ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya siswa dan mempromosikan keberagaman sebagai kekuatan positif dalam pendidikan. Dengan cara ini, kurikulum baru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial lokal serta nasional yang lebih luas (Laili & Fatkhurrozi, 2023).

Metode pengajaran pada masa awal kemerdekaan juga mengalami transformasi besar. Pendekatan-pendekatan baru yang lebih aktif dan kolaboratif mulai diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru-guru didorong untuk menggunakan metode yang lebih berorientasi pada siswa, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Metode-metode ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memotivasi mereka untuk berpikir secara kritis dan kreatif, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses belajar. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang mendalam tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Metode pengajaran ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pengajaran konvensional yang sebelumnya terlalu fokus pada ceramah dan hafalan, serta lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif dan partisipatif (Fauzi, 2024).

Keterbatasan akses terhadap buku-buku dan materi pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu tantangan utama dalam menerapkan kurikulum dan metode pengajaran baru di Sulawesi Selatan. Buku-buku dan materi pendidikan sering kali tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil, yang menghambat upaya untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua siswa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan masyarakat setempat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih inklusif. Program-program swadaya, seperti pengumpulan buku dan materi pendidikan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan akses terhadap sumber belajar. Meskipun teknologi informasi pada masa itu masih dalam tahap perkembangan awal, upaya untuk mengintegrasikan media pembelajaran interaktif dan platform online mulai mendapatkan perhatian sebagai alat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil (Muhlis DP, 2011).

Transformasi kurikulum dan metode pengajaran di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan mencerminkan komitmen yang kuat untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara. Proses perubahan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan masa depan generasi muda di Sulawesi Selatan. Dengan menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah yang diambil selama periode ini merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan

mendukung pertumbuhan serta perkembangan masyarakat di wilayah ini. Meskipun banyak tantangan yang harus diatasi, upaya untuk menerapkan kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif dan adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan merata di Sulawesi Selatan, sekaligus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Jenjang Pendidikan

Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan di Sulawesi Selatan mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah yang baru merdeka berusaha untuk mengkonsolidasikan sistem pendidikan yang selama ini terpecah-pecah akibat kolonialisme Belanda dan Jepang. Pendidikan pada masa itu terdiri dari pendidikan formal yang dikelola oleh negara, pendidikan Islam yang dikelola oleh pesantren dan madrasah, serta pendidikan Katolik yang dikelola oleh gereja dan misi Katolik.

Pendidikan dasar pada masa itu dimulai dari Sekolah Rakyat (SR), yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Dasar (SD). Sekolah Rakyat menjadi jenjang pendidikan yang sangat penting karena menjadi pondasi bagi pendidikan lanjutan. Pada masa kolonial Belanda, sekolah-sekolah ini didirikan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak pribumi. Namun, setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih dan memperluas jaringan sekolah dasar. Di Sulawesi Selatan, sekolah dasar ini berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Fasilitas pendidikan pada masa itu masih sangat terbatas, dengan banyak sekolah yang hanya memiliki ruang kelas seadanya dan

peralatan belajar yang minim. Namun, semangat belajar anak-anak dan dukungan dari masyarakat setempat sangat tinggi (Najamuddin, 2015).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat, anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Pertama pada masa itu menawarkan kurikulum yang lebih luas, termasuk mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan geografi. Sekolah-sekolah menengah pertama ini mulai berkembang di kota-kota besar seperti Makassar, namun di daerah pedesaan dan terpencil, jumlahnya masih sangat terbatas. Banyak siswa di daerah terpencil yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa bersekolah di SMP. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam penyebaran pendidikan menengah pertama di seluruh Sulawesi Selatan.

Jenjang pendidikan berikutnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), yang merupakan jenjang pendidikan yang lebih khusus dan terfokus pada persiapan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. SMA menawarkan kurikulum yang lebih mendalam dalam bidang-bidang tertentu seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan bahasa. Di Sulawesi Selatan, jumlah SMA pada masa awal kemerdekaan masih sangat terbatas, dan kebanyakan berlokasi di kota-kota besar seperti Makassar. Namun, pemerintah berusaha untuk mendirikan lebih banyak SMA di daerah-daerah lain untuk meningkatkan akses pendidikan menengah atas bagi semua siswa. Kondisi fisik sekolah-sekolah ini sering kali lebih baik dibandingkan dengan sekolah dasar dan menengah pertama, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal fasilitas

dan sumber daya pengajaran. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Sulawesi Selatan (Bahri; Andi, Dewi Riang, 2019).

Pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa awal kemerdekaan juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Urbanisasi dan modernisasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana untuk membaca dan menulis, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Hal ini mendorong peningkatan jumlah anak-anak yang bersekolah dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Bahri; Bustan; Andi, Dewi Riang, 2018).

Selain itu, pengaruh pendidikan Belanda masih terasa pada masa awal kemerdekaan. Banyak sekolah yang didirikan pada masa kolonial tetap beroperasi dan mengikuti kurikulum yang mirip dengan yang diterapkan pada masa kolonial. Namun, pemerintah Indonesia berusaha untuk menggantinya dengan kurikulum nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Usaha ini melibatkan penyesuaian materi pelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi. Kurikulum nasional menekankan pentingnya pendidikan moral dan kewarganegaraan untuk membentuk karakter anak-anak bangsa yang cinta tanah air dan memiliki integritas.

Pendidikan Islam, dengan pesantren dan madrasahnyanya, juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam di Indonesia, tidak hanya

memberikan pendidikan agama tetapi juga pengetahuan umum yang esensial. Pendidikan pesantren sering kali berbasis pada kitab-kitab klasik Islam dan diberikan oleh kyai atau ustadz yang berpengalaman. Pesantren-pesantren ini berfungsi sebagai pusat pengembangan agama dan budaya Islam di masyarakat. Selain itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal Islam, memberikan pendidikan agama dan umum secara terintegrasi. Madrasah-madrasah di Sulawesi Selatan berkembang pesat dan menjadi alternatif yang populer di kalangan masyarakat Muslim (A. Abdullah, 2013).

Sekolah-sekolah Katolik yang didirikan oleh gereja dan misi Katolik juga memberikan kontribusi besar dalam penyebaran pendidikan. Sekolah-sekolah ini dikenal dengan kualitas pendidikan yang baik dan penekanan pada disiplin dan moralitas. Mereka berperan dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak di daerah-daerah terpencil yang sering kali tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah negeri. Gereja Katolik juga aktif dalam mengadakan berbagai program sosial yang mendukung pendidikan, seperti beasiswa bagi siswa berprestasi dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program-program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menciptakan masyarakat yang terpelajar dan terinformasi, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang merdeka (*Citra Sulawesi Selatan Dalam Arsip*, 2009).

Kursus buta huruf pada masa awal kemerdekaan sering kali diprakarsai oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan agama. Program-program ini melibatkan pelatihan untuk membaca, menulis, dan berhitung yang diberikan secara intensif kepada peserta. Di Sulawesi Selatan, kursus buta huruf sering kali dilaksanakan di

balai desa, masjid, atau gereja, tergantung pada lokasi dan dukungan komunitas setempat. Pengajaran dilakukan oleh para relawan, guru, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dasar tentang pendidikan. Walaupun fasilitas yang tersedia sangat terbatas, semangat belajar yang tinggi dari para peserta sering kali mengatasi keterbatasan ini.

Salah satu contoh pelaksanaan kursus buta huruf yang sukses adalah program-program yang dijalankan oleh pesantren dan madrasah di Sulawesi Selatan. Pesantren, yang sudah lama dikenal sebagai pusat pendidikan agama, juga berperan dalam pendidikan umum dengan menyediakan kursus buta huruf bagi masyarakat sekitar. Para santri dan guru di pesantren sering terlibat dalam mengajarkan keterampilan dasar membaca dan menulis kepada penduduk lokal. Metode pengajaran di pesantren ini biasanya melibatkan penggunaan alat bantu visual seperti papan tulis dan buku pelajaran sederhana. Kursus ini tidak hanya membantu peserta dalam memperoleh keterampilan dasar, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama dan sosial yang diajarkan di pesantren.

Di sisi lain, kursus buta huruf yang dikelola oleh gereja Katolik juga memainkan peran penting dalam mengatasi buta huruf di Sulawesi Selatan. Gereja Katolik sering kali menyelenggarakan program-program pendidikan di komunitas lokal sebagai bagian dari misi sosial mereka. Kursus-kursus ini biasanya dilaksanakan di sekolah-sekolah Katolik atau pusat-pusat kegiatan gereja dan melibatkan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung dengan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan dasar tetapi juga pada pembinaan karakter dan moral peserta. Melalui upaya ini, gereja Katolik membantu

banyak orang untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat dan ekonomi. Pemerintah pusat juga berperan dalam mendukung kursus buta huruf melalui berbagai kebijakan dan program. Dengan memberikan pelatihan kepada para pendidik dan menyediakan materi ajar yang sesuai, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa kursus-kursus ini efektif dan dapat mencapai tujuan mereka.

Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi buta huruf, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas pendidikan, dan tantangan geografis menjadi hambatan dalam pelaksanaan kursus buta huruf di Sulawesi Selatan. Banyak daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga pengajar dan bahan ajar, yang menyebabkan beberapa komunitas kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Selain itu, kurangnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari sektor swasta dan pemerintah, sering kali menghambat upaya-upaya ini. Meskipun demikian, semangat dan dedikasi dari para relawan, guru, dan masyarakat setempat tetap menjadi kekuatan utama dalam mengatasi buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan pada awal kemerdekaan Indonesia, dengan menyoroti infrastruktur pendidikan sebagai fokus utama yang terhambat oleh tantangan geografis. Sulawesi Selatan, yang terdiri dari pegunungan dan pulau terpencil, menghadapi kesulitan dalam membangun sekolah yang merata dan berkualitas. Kekurangan guru terlatih juga menjadi perhatian utama, dengan banyak

guru minim pendidikan formal atau pelatihan profesional, mempengaruhi kualitas pengajaran. Transformasi kurikulum nasional dan partisipasi masyarakat lokal juga diperlukan untuk meningkatkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah ini.

Artikel ini juga mengungkapkan upaya penting dalam memperluas akses pendidikan di Sulawesi Selatan. Pendirian Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di berbagai kabupaten, bersama dengan lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren dan madrasah, berkontribusi pada pemerataan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Meskipun berbagai tantangan masih ada, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Transformasi kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, bersamaan dengan penyebaran lembaga pendidikan, memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan pada awal kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah : Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(September), 213–228.
- Abdullah, T. (2010). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gadjah Madja University Press.
- Asba, A. R. (2007). *Kopra Makassar: Perebutan pusat dan daerah: Kajian sejarah ekonomi politik regional di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Bahri; Andi, Dewi Riang, T. (2019). LONTARAK ; SUMBER BELAJAR SEJARAH LOKAL SULAWESI SELATAN. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 50–66. <https://doi.org/10.21009/JPS.081.05>
- Bahri; Bustan; Andi, Dewi Riang, T. (2018). Democracy Values on Learning Local History of South Sulawesi. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 226, 1067–1069.

- Basri, H., Afriza, Nurhayuni, A. P. (2024). Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 1609–1623. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5334>
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (2nd ed.). Sage Publications.
- Chairunnisa, D., Syam, L., Tahir, A., Ramadhani, A., & Sadriani, A. (2024). Evolusi Kurikulum Pendidikan Indonesia : Sejarah Dan Perubahan dari Masa ke Masa. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 518–523.
- Citra Sulawesi Selatan dalam Arsip. (2009).
- Darmawan, D. (2018). *Pendidikan di masa revolusi: Menelusuri jejak-jejak sekolah darurat di Indonesia Timur*. Pustaka Sejarah.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>.
- Fauzi, L. Y. (2024). *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Haryanah, N. (2004). REKONSTRUKSI SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA. *XX*(4), 540–554.
- Hasan, M. (2019). Dinamika kurikulum pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan (1945-1950). *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 7(2), 112-128.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam*, 8, 43–64.
- Laili, F. N. Y. A., & Fatkhurrozi, A. H. M. N. (2023). Fiqih Nur Laili , Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *MODELING: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam*, 10, 417–432.
- Latif, Y. (2014). *Inteligensia Muslim dan kuasa: Genealogi inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Mizan.
- Muhlis DP. (2011). Kebijakan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan Muchlis. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 49–58.
- Najamuddin. (2015). Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik Pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Istoria*.
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154.

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>

- Poelinggomang, E. L. (2016). *Makassar abad XIX: Studi tentang kebijakan perdagangan maritim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahman, A. (2020). Kontestasi ideologi dalam ruang kelas: Pendidikan di Sulawesi Selatan pada masa Negara Indonesia Timur (NIT). *Jurnal Sejarah Lintas Kultural*, 5(1), 45-62.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200 (4th ed.)*. Stanford University Press.
- Said, M. (2015). *Sejarah pendidikan di Sulawesi Selatan: Dari masa kolonial hingga orde baru*. Universitas Hasanuddin.
- Saputra, A. (2008). Menuju Sistem Pendidikan Global. *UNISIA*, 31.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1-12.
- St. Junaeda. (2014). Menelisik Jejak Pendidikan di Sulawesi Selatan: Dari Sistem Pendidikan Tradisional Hingga Sistem Pendidikan Modern. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, II(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v2i01.1341>
- Sukmana, W. J. (2021). *Metode Penelitian Sejarah*. Seri Publikasi Pembelajaran.
- Suradi, A. (2018). Pendidikan berbasis multikultural dalam pelestarian kebudayaan lokal nusantara di era globalisasi. *Wahana Akademika*, 5.
- Syukur, M. (2021). Dampak sosial-politik kampanye militer Westerling terhadap kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 88-105.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Rineka Cipta.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Wahib, S. A. (2022). Studi Historis Perkembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 83--90.